ABSTRAK PENELITIAN

Judul	: Efektivitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa
Peneliti	: Priyatmoko
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sumber beaya	: DPP Universitas Airlangga tahun 1987/1988

Perkembangan pembangunan kini telah kian lanjut, meluas dan mendalam. Tujuan-tujuan proses pembangunan kian bersegi banyak (multi-purpose processes). Tali-temali antara aspek yang satu dengan aspek yang lain, antara perubahan yang satu dengan perubahan yang lain senantiasa perlu dicermati dengan tekun, rajin, teliti, dan bersinambung, mengingat tali-temali tersebut jangkauan kuantitatif dan kualitatif kian rumit. Perubahan tertentu di satu bidang dapat mempunyai dampak yang luas di berbagai bidang, yang seringkali tidak dapat diduga, diperhitungkan, atau direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, secara jujur harus diakui bahwa segenap proses pembangunan tersebut sebenarnya merupakan jalinan tali-temali fungsional yang cukup rumit untuk dapat dimengerti, dicermati, dan dimanipulasi atau dikendalikan.

Dalam perkembangan demikian itu setiap pengabdi

pembangunan ..

pembangunan -- baik yang bekerja pada tingkat perancangan dan perencanaan maupun pelaksana dan pekerja teknis di lapangan perlu dibekali wawasan yang multi-disipliner sifatnya, menerabas batas-batas kerutinan pekerjaan masing-masing. Para penyusun kebijaksanaan pembangunan umumnya sangat bergantung pada pengabdi-pengabdi pembangunan di lapangan, terutama mengenai ketepatan gambaran realitas sosial di mana kebijaksanaannya akan diterapkan serta dampak-dampak, posistip maupun negatip, yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang telah dibuatnya. Laporan dari lapangan adalah kekuasaan para pengabdi pembangunan di lapangan.

Dalam pada itu terasa betapa pentingnya peran institusi penyelenggara pembangunan desa. Dari hasil kerjanya diharapkan proses perubahan pembangunan desa dapat berlangsung terarah dan terkendali secara terpadu. Karena alasan, antara lain efisiensi dan untuk menghindari dualisme administrasi pembangunan, pemerintahan desa sekaligus berfungsi sebagai institusi penyelenggara pembangunan desa. Ada beberapa masalah yang timbul dalam pencangkokan fungsi baru ini. Dan, masalah-masalah ini cukup jelas terasakan di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Rawan yang dijadikan daerah penelitian ini. Sebagian masalah tersebut timbul karena aparat pemerintahan desa umumnya tidak direkrut dan dipersiapkan secara khusus untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan. Yang terjadi kemudian, tugas-tugas pembangunan diintegrasikan dalam tugas-tugas rutinnya, yang

dasar ...

dasar-dasar filosifis dan karakternya agak berbeda dengan tradisi kekuasaan yang selama ini telah berkembang. Hubungan kekuasaan pada hirarkhi pokoknya seringkali berakibat pada ketidakberanian mereka untuk menyusun laporan secara jujur. Legitimasi kekuasaan barangkali berbeda dasar-dasarnya dibanding dengan tuntutan pembangunan. Lebih dari itu, persaingan-persaingan politik yang melibatkan jajaran birokrasi pemerintahan sebagai salah satu pemain utamanya, menjadikan persoalan pembangunan sangat politis sifatnya.

Politisasi proses pembangunan desa, sekurang-kurangnya dapat menggeser prinsip-prinsip dan ukuran-ukuran manajemen di bawah prioritas-prioritas politik. Dalam hal terjadi pertentangan politik, maka pemborosan pembangunan tak dapat dielakkan, karena pertentangan politik akan menjadi indentik dengan pertentangan pembangunan. Partisipasi dan keswadayaan pembangunan seolah-olah telah berubah menjadi semacam "oposisi pembangunan".